

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, oleh karena itu dalam hal ini sudah pasti memerlukan dana dalam rangka pembiayaan pembangunannya. Pada zaman otonomi daerah seperti pada saat ini, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah (Desentralisasi) untuk menggali sumber – sumber keuangan yang ada. Sejalan dengan desentralisasi ini, pembiayaannya pun ikut terdesentralisasi dan berimplikasi masing – masing daerah yang dituntut untuk dapat membiayai biaya pembangunannya secara mandiri. Keseriusan Pemerintah diwujudkan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang disebutkan bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan”.

Kebijakan ekonomi daerah yang bergulir telah bergulir ini menempatkan kabupaten dan kota sebagai titik berat ekonomi, nampaknya telah membawa perubahan dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Hal tersebut sangat baik bagi perkembangan pembangunan daerah di Indonesia, yang tentunya

diharapkan juga dapat berimplikasi baik pada peningkatan pelayanan, perbaikan, kesejahteraan, dan jaminan hidup yang lebih baik kepada masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan partisipasi dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan pembangunan diseluruh daerah dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia di masing-masing daerah. Selain itu, pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan salah satu aspek penting, daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal agar mampu memenuhi kebutuhan fiskal sehingga tidak mengalami kesenjangan fiskal. Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas daerah tersebut adalah dengan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan kepentingan Pemerintah Daerah dan lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan. (Siahaan, 2015). Menurut Undang - Undang No 34 Tahun 2004, pendapatan daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah dalam menjalankan organisasi pemerintahannya memerlukan sumber pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai kegiatannya. Salah satu penerimaan pemerintah tersebut berasal dari pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah hendaknya didukung upaya pemerintah daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2002).

Berdasarkan pengertian di atas, mengandung implikasi bahwa kebijakan otonomi daerah memberikan kesempatan dan kekuasaan yang lebih luas bagi pemerintah daerah (khususnya pada tingkat kabupaten/kota) untuk melakukan berbagai kebijakan publik berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah di daerahnya masing-masing. Dalam mengestimasi potensi pendapatan asli daerah di suatu daerah, diperlukan berbagai informasi dan tolak ukur yang benar – benar terjadi di lapangan secara konkrit diinginkan dan dibutuhkan oleh seluruh komponen masyarakat. Salah satu contoh tolak ukur finansial yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah dengan mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan suatu daerah dalam menjalankan roda keorganisasiannya, sedangkan kemampuan keuangan

daerah ini biasanya diukur dari besarnya proporsi atau kontribusi pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan daerah.

Besarnya persentase potensi pendapatan daerah yang bisa digali dari tiap kabupaten/kota dan potensi daerah tersebut dapat menghasilkan pemasukan yang cukup untuk memenuhi target pendapatan asli daerah di tiap – tiap kabupaten/kota. Oleh karena itu, beberapa pihak pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tiap kabupaten/kota dengan menyusun strategi dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki dari setiap potensi yang ada. Upaya peningkatan salah satunya adalah dengan mengoptimalkan tingkat potensi yang ada serta memaksimalkan pendapatan asli daerah dari sektor pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ada.

Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah merupakan tingkat sumbangan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan asli daerah yang dapat diketahui dengan membandingkan pendapatan asli daerah dalam satu tahun anggaran. Sumber pendapatan asli daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran

atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mardiasmo, 2011).

Siahaan (2010) menjelaskan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Retribusi daerah adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan negara bagi penduduknya secara perorangan. Dengan demikian, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan Pemerintah Daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Menurut Halim (2009) permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya adalah berkaitan dengan penggalan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari pendapatan asli daerah masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Hal tersebut dapat mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah.

Dalam rangka menciptakan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya untuk meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan asli daerah. Pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan pada berbagai jenis pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, agar dapat dipungut secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang serta peraturan daerah yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis mempunyai keinginan untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah antar Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 – 2014?
2. Bagaimanakah pengaruh kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah antar Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 – 2014?
3. Bagaimanakah tingkat pencapaian realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan oleh masing – masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 – 2014?

### **1.3 Batasan Masalah**

Data yang digunakan adalah data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Antar Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2010 sampai 2014. Laporan keuangan merupakan hal terpenting yang dijadikan sebagai pertimbangan oleh pengguna informasi keuangan dalam pengambilan keputusan. Namun, tidak semua pengguna informasi laporan keuangan dapat memahami dan menafsirkan informasi yang tertera dalam laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya sebuah analisis. Analisis ini hanya dilakukan pada 5 besar pemasukan pajak daerah dan retribusi daerah tertinggi antar Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada setiap tahunnya.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui:

1. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di tiap – tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 – 2014.
2. Kontribusi Retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di tiap – tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 – 2014.
3. Bagaimanakah tingkat pencapaian realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan oleh masing – masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 – 2014?

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian skripsi ini antara lain :

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat untuk memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi, terutama dalam hal pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah .



## 2. Manfaat Praktis

### a) Bagi Penulis

Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapat pada masa pembelajaran di bangku kuliah ke dalam praktik yang sesungguhnya, terkhusus pada obyek yang akan diteliti.

### b) Bagi masing-masing Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan dalam mempengaruhi pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.
- 2) Menyediakan informasi mengenai pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dalam kurun waktu 2010 – 2014.
- 3) Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

### c) Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan masukan serta referensi bagi pihak – pihak yang ingin melaksanakan penelitian di bidang yang sama pada karya ilmiah selanjutnya.

## 1.5 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini menggunakan sistematika pembahasan dengan susunan sebagai berikut :

## **Bab I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

## **Bab II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan sebagai dasar dalam pemecahan masalah yang dihadapi yaitu pengertian dari motivasi, minat, profesi akuntan, pendidikan profesi akuntansi, tinjauan penelitian terdahulu, dan perumusan hipotesis.

## **Bab III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai populasi dan sampel, data yang diperlukan, metode pengumpulan data, variabel dan pengukurannya, serta analisis data.

## **Bab IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, hasil penelitian dianalisis berdasarkan teori untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan. Pembahasan pada bab ini meliputi pengujian dan penghitungan analisis deskriptif responden, penghitungan variabel penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

## **Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, implikasi dari hasil penelitian dan saran untuk penelitian berikutnya.